

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kejatuhan rezim Bashar al-Assad pada akhir 2024 menjadi titik balik dalam sejarah politik Suriah. Setelah lebih dari lima dekade kekuasaan keluarga Assad, Suriah memasuki babak baru yang membuka peluang menuju sistem politik yang lebih inklusif dan demokratis. Namun, proses transisi tersebut tidak berlangsung mulus. Mengacu pada teori transisi demokrasi Samuel P. Huntington, transisi di Suriah dapat diklasifikasikan dalam dua mekanisme: replacement, yaitu penggulingan rezim otoriter oleh kekuatan domestik, dan intervensi, yaitu keterlibatan aktor eksternal dalam mengubah struktur kekuasaan. Melalui metode *Comparative Historical Analysis* (CHA) dalam format *single case study*, artikel ini menganalisis transisi politik Suriah berdasarkan empat komponen utama: sejarah, *cleavage*, *critical juncture*, dan *legacy*.

Secara historis, rezim otoriter Assad yang dimulai sejak 1970 membentuk struktur kekuasaan yang sangat terpusat dan sektarian. Hafez al-Assad, ayah Bashar, menciptakan sistem pemerintahan berbasis kekuatan militer dan jaringan loyalis Alawi, yang kemudian diwarisi oleh Bashar al-Assad. Stabilitas yang dicapai melalui represivitas ini membatasi oposisi, namun juga menumpuk ketegangan sosial. Ketidakpuasan masyarakat terhadap ketimpangan sosial-ekonomi dan kebijakan otoriter menjadi landasan munculnya protes tahun 2011. Komponen kedua, yaitu *cleavage* atau perpecahan sosial-politik, mencerminkan ketegangan mendalam antara komunitas Sunni yang mayoritas dan kelompok Alawi minoritas yang mendominasi kekuasaan. Ketegangan ini meledak saat rezim merespons protes secara represif. Fragmentasi oposisi berdasarkan etnis, agama, dan kepentingan politik memperburuk konflik dan menghambat upaya kolektif dalam menggulingkan Assad secara efektif.

Titik balik utama (*critical juncture*) terjadi pada tahun 2024, ketika gelombang serangan pemberontak akhir 2024 secara langsung mengguncang jantung kekuasaan rezim Assad. Kejatuhan kota-kota strategis seperti Aleppo, Hama, dan akhirnya Damaskus, menandai berakhirnya dominasi politik Bashar al-Assad. Saat itu, upaya *replacement* oleh oposisi

domestik ditopang oleh intervensi asing, yang dimana intervensi dari Rusia dan Iran menjadi faktor penentu yang mempertahankan kekuasaan Assad. Dukungan militer dan diplomatik dari dua negara ini memainkan peran kunci dalam meruntuhkan rezim assad. Warisan politik (*legacy*) dari konflik ini akan membentuk masa depan Suriah dalam jangka panjang. Meskipun Assad secara formal tumbang pada akhir 2024, kehancuran institusi, trauma sosial, dan ketegangan sektarian yang ditinggalkan menjadi tantangan besar bagi demokratisasi. Proses rekonsiliasi nasional dan restrukturisasi negara akan sangat ditentukan oleh bagaimana faksi-faksi domestik dan aktor internasional bersikap pasca-konflik.

Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada upaya *replacement* dari dalam negeri, intervensi internasional lebih dominan dalam mempertahankan dan memperpanjang rezim Assad hingga akhir kekuasaannya. Faktor eksternal inilah yang paling menentukan dalam menghambat transisi demokrasi yang bersumber dari kehendak rakyat.

5,2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar peneliti selanjutnya memperluas kajian dengan membandingkan kasus Suriah dengan negara Arab Spring lainnya seperti Libya atau Yaman untuk memahami pola transisi demokrasi di kawasan. Bagi pemerintah dan organisasi internasional, penting untuk merancang intervensi yang berpihak pada rakyat sipil serta mendukung keadilan transisional dan institusi demokratis, bukan semata-mata kepentingan geopolitik. Sementara itu, akademisi dan pengkaji politik Timur Tengah perlu mengembangkan pendekatan interdisipliner agar dapat menangkap kompleksitas transisi politik Suriah secara lebih komprehensif dan kontekstual.